

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di pemerintahan pusat maupun daerah untuk dapat memberikan pertanggungjawaban yang lebih transparan, efisiensi dan lebih akurat dibutuhkan laporan pertanggungjawaban kinerja keuangan kepada publik yaitu berupa laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan salah satu bagian yang rentan terhadap *fraud*, seperti banyaknya kasus kecurangan (*fraud*) yang terjadi di berbagai negara termasuk di Indonesia (Fajarina, Wirda, 2012). Tindakan *fraud* yang dilakukan oleh birokrasi pemerintahan menimbulkan keprihatinan dan diperlukan perhatian khusus dari berbagai pihak, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (Mudzakkir, 2005).

Kecurangan yang dilakukan disebabkan karena memiliki keinginan untuk dapat memaksimalkan keuntungan kelompok atau pribadi. Semakin berkembangnya *fraud*, pelaku-pelaku pun tidak terbatas pada golongan tingkat atas, namun banyak yang menyentuh lapisan pegawai tingkat bawah. Banyak upaya pemerintah dalam menangani kasus *fraud*, namun belum adanya perubahan atau indikasi bahwa akan segera terhenti. Dengan berjalannya waktu tindakan kecurangan yang terungkap semakin banyak dan para pelakunya semakin kompleks dan banyak. Padahal laporan keuangan

merupakan sumber informasi penting dalam organisasi sebagai alat komunikasi publik dan pengambilan keputusan (Adinda, 2015).

Fraud merupakan konsep pelanggaran yang memiliki konteks yang sangat luas. *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) membagi fraud dalam tiga jenis berdasarkan perbuatannya, yaitu: korupsi (*corruption*), penyalahgunaan asset (*asset misappropriation*), dan kecurangan dalam laporan keuangan (*financial statement fraud*). ACFE menyebutkan bahwa *fraud* merupakan perbuatan yang di anggap melawan sebuah hukum yang dilakukan dengan sengaja hanya untuk mencapai tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan yang salah terhadap pihak lain) yang juga dilakukan oleh kelompok ataupun individu baik itu dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan hanya untuk mendapatkan atau memperoleh keuntungan pribadi ataupun kelompok yang secara tidak langsung atau langsung yang dapat merugikan pihak lain (Pratiwi, 2018).

Berdasarkan laporan *Report To The Nations* (RTTN) yang dikeluarkan oleh ACFE global diperoleh data dari negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasific *fraud* yang paling banyak terjadi yaitu korupsi 51% dan di Indonesia terdapat 29 kasus *fraud*. Dari hasil survai oleh AFCE Indonesia sepanjang tahun 2016, *fraud* yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah korupsi yaitu sebesar 67% selanjutnya adalah penyalahgunaan asset 31% dan kemudian sebanyak 2% dalam kecurangan laporan keuangan (*Association of Certified Fraud Examiners*, 2017).

Papua adalah salah satu provinsi yang tidak terlepas dari adanya praktik-praktik kecurangan yang dilakukan oknum-oknum di birokrasi pemerintahan. Kasus korupsi yang terjadi antara lain, korupsi proyek jalan kemiri-depape yang dilakukan oleh oknum kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua. Pelaku kecurangan diduga melakukan suatu perbuatan melawan hukum yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan selaku kepala dinas sekaligus pengguna anggaran untuk menguntungkan diri sendiri atau korporasi, sehingga ada indikasi yang menyebabkan kerugian Negara senilai Rp 42 miliar (Kaltengpos.co, 2019).

Kemudian ada juga kasus yang baru-baru ini terjadi adalah kasus kecurangan dalam penggunaan dana desa di kampung Koya Koso yang dilakukan oleh aparat pemerintah setempat, Kota Jayapura. Pelaku melakukan kecurangan dan menyalahgunakan kewenangan selaku kepala kampung yang diduga melakukan pekerjaan fiktif untuk dapat menguntungkan diri sendiri dan kelompok. Sehingga menyebabkan kerugian Negara senilai Rp 1,4 miliar (Regional.kompas.com, 2019)

Fenomena kasus *fraud* di atas bukanlah suatu hal yang baru terjadi di pemerintahan yang dilakukan oleh pimpinan maupun staf. Banyak faktor penyebab sehingga baik itu pimpinan maupun staf melakukan tindakan kecurangan. Menurut *fraud pentagon theory* sebagai pengembangan dari teori *fraud triangle* dijelaskan oleh Cressey (1952) dengan menambahkan elemen baru maka secara lengkap terdapat lima (5) faktor yang menggambarkan mengapa alasan seseorang lebih cenderung melakukan kecurangan, yaitu;

tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), pembenaran (*rationalization*), kemampuan (*competence*), dan arogan (*arrogance*). Seseorang cenderung melakukan kecurangan karena tidak merasakan suatu kepuasan dengan apa yang sudah mereka miliki, padahal mereka bukanlah orang-orang dengan penghasilan yang sedikit namun karena sifat keserakahan sehingga mereka menginginkan penghasilan yang lebih. Faktor pertama yang dapat mempengaruhi kecurangan (*fraud*) yaitu kompensasi. Kompensasi menurut Hasibuan (2003) merupakan semua pendapatan yang dapat berbentuk uang, barang langsung atau juga tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan oleh perusahaan atau organisasi untuk balas jasa atas kontribusi yang mereka berikan kepada organisasi atau perusahaan. Dengan kompensasi atau tunjangan yang sesuai, dapat mengurangi perilaku *fraud*. Individu diharapkan telah mendapatkan rasa kepuasan dari kompensasi atau tunjangan tersebut sehingga tidak melakukan kecurangan dalam akuntansi untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Untuk menangani masalah *fraud* diperlukan monitoring sehingga mendapatkan hasil monitoring yang baik maka, diperlukan pengendalian internal yang efektif (Wilopo, 2003) dikutip dalam (Adelin, 2013). Suatu pengendalian internal yang baik dapat memungkinkan pihak manajemen siap menghadapi suatu perubahan ekonomi yang cepat, persaingan, pergeseran permintaan pelanggan serta restrukturisasi untuk kemajuan suatu organisasi yang akan datang (Ruslan, 2009) dalam Hermiyetti (2007). Jika suatu sistem pengendalian internal perusahaan lemah maka kemungkinan akan terjadinya

kecurangan (*fraud*) dan kesalahan semakin besar. Sebaliknya, jika pengendalian internal kuat, maka dapat meminimalisir suatu kecurangan yang mungkin terjadi.

Dewasa ini perkembangan teknologi digital yang terus berkembang dapat memberikan banyak kemudahan pada berbagai usaha atau bisnis. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan pemberdayaan sumber alat-alat yang ada dengan tujuan dan konsep sistematis yang berguna untuk dapat mengolah data, memproses, mendapatkan, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk dapat menghasilkan informasi yang berkualitas. Jadi semakin bagus suatu pemanfaatan teknologi di instansi pemerintah maka, semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkannya (Utama, 2017).

Kompetensi atau kemampuan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kecurangan (*fraud*). Kompetensi adalah suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), kemampuan (*ability*) dan pengetahuan (*knowledge*) untuk melaksanakan pekerjaan (Harvest, 2005) dalam (Karmita, 2015). Menurut beberapa ahli, kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang untuk mencapai kinerja yang tinggi di dalam pekerjaannya. Jika pegawai yang memiliki kompetensi atau kemampuan yang kurang/lemah maka kemungkinan terjadinya kecurangan (*fraud*) semakin besar. Namun sebaliknya, jika kompetensi atau kemampuan baik, maka kemungkinan terjadi kecurangan dapat diperkecil.

Selain faktor-faktor di atas, budaya etis organisasi juga memiliki suatu pengaruh terhadap kecurangan (*fraud*). Dari faktor eksternal (organisasi), *fraud* dapat dipicu karena buruknya budaya organisasi yang diterapkan oleh organisasi tempat individu tersebut bekerja. Menurut Schein (1992:12), budaya organisasi merupakan suatu pola dasar yang diterima oleh organisasi untuk bertindak dan memecahkan masalah, dengan membentuk suatu karyawan yang mampu dalam beradaptasi dengan lingkungan kerja dan juga mampu mempersatukan anggota-anggota lainnya. Adapun fungsi budaya organisasi menurut Robbins (2006) adalah sebagai berikut: (1) Budaya menciptakan perbedaan yang jelas antara satu organisasi dan yang lain, (2) Budaya membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi, (3) Budaya mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan diri individual seseorang, (4) Budaya merupakan perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi itu dengan memberikan standar-standar yang tepat untuk dilakukan oleh seorang karyawan, (5) Budaya sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang membantu dan membentuk sikap serta perilaku karyawan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh banyak peneliti, terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan baik pada organisasi pemerintahan maupun organisasi sektor privat. Diantaranya yang dilakukan dalam penelitian Pratiwi (2018) yang meneliti pengaruh kesesuaian kompensasi, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, budaya etis organisasi dan kompetensi terhadap *fraud*. Hasilnya

menyimpulkan bahwa apabila semakin baik sistem pengendalian internal maka tindakan seseorang untuk melakukan *fraud* semakin rendah dan apabila pemanfaatan teknologi informasi yang tinggi maka, dapat meminimalisir terjadinya suatu kecurangan (*fraud*). Namun, kesesuaian kompensasi, budaya etis organisasi dan kompetensi tidak memiliki pengaruh terhadap kecurangan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggali pandangan atau persepsi para pegawai di instansi pemerintah untuk mengetahui kecenderungan terjadinya kecurangan (*fraud*) dan juga faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Faktor-faktor ini terdiri dari kesesuaian kompensasi, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi dan budaya etis organisasi. Sehubungan dengan uraian yang telah di jelaskan di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul yaitu **“PENGARUH KESESUAIAN KOMPENSASI, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPETENSI DENGAN BUDAYA ETIS ORGNISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING TERHADAP *FRAUD*”**. Dengan mereplikasi penelitian Pratiwi (2018) yang dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandar Lampung dan OPD Kabupaten Pesawaran tahun 2018, yang membedakan penelitian ini adalah dengan menambahkan variabel moderasi pada budaya etis organisasi dan penempatan lokasi penelitian yang berbeda yaitu di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Jayapura pada tahun 2020.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*)?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*)?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*)?
4. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*)?
5. Apakah kesesuaian kompensasi yang dimoderasi oleh budaya etis organisasi berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*)?
6. Apakah sistem pengendalian internal yang dimoderasi oleh budaya etis organisasi berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*)?
7. Apakah pemanfaatan teknologi informasi yang dimoderasi oleh budaya etis organisasi berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*)?
8. Apakah kompetensi yang dimoderasi oleh budaya etis organisasi berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*)?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecurangan (*fraud*).
2. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kecurangan (*fraud*).

3. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kecurangan (*fraud*).
4. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh kompetensi terhadap kecurangan (*fraud*).
5. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh kesesuaian kompensasi yang dimoderasi budaya etis organisasi terhadap kecurangan (*fraud*).
6. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh sistem pengendalian internal yang dimoderasi budaya etis organisasi terhadap kecurangan (*fraud*).
7. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh pemanfaatan teknologi informasi yang dimoderasi budaya etis organisasi terhadap kecurangan (*fraud*).
8. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh kompetensi yang dimoderasi budaya etis organisasi terhadap kecurangan (*fraud*).

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak yang baik, baik itu secara akademik ataupun praktis untuk berbagai pihak yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan mengenai kecurangan (*fraud*) dalam akuntansi yang dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah agar dapat mendeteksi dan melakukan tindak pencegahan lebih dini untuk meminimalisir kasus *fraud*.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini di jelaskan mengenai latar belakang masalah yang melandasi judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas tinjauan pustaka yang terdiri dari landasan teori dalam penelitian, riset sebelumnya dan pengembangan hipotesis, serta model penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini akan membahas mengenai ruang lingkup penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional dan metode analisis.